

Evaluasi Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus tentang Bali Smart Island di Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng (*Evaluation of Special Financial Assistance Policy Regarding Bali Smart Island in Pakraman Village in Buleleng Subdistrict*)

Ketut Widiasta^{1*}, Ida Ayu Putu Sri Widnyani², I Wayan Astawa³

Universitas Ngurah Rai Denpasar, Bali ^{1,2,3}

widiasta741@gmail.com^{1*}, dayusriwid@gmail.com²



Riwayat Artikel

Diterima pada 25 Maret 2023

Revisi 1 pada 4 April 2023

Revisi 2 pada 11 April 2023

Disetujui pada 14 April 2023

Abstract

Purpose: The Special Financial Assistance (BKK) policy from the Province of Bali through the Bali Smart Island (BSI) program in Pakraman Village in Buleleng Subdistrict is to improve digital-based public services by providing free wifi. With equitable access to information technology such as the internet network in Pakraman Village, it can realize equitable development in all fields.

Research methodology: This research method uses a qualitative descriptive approach.

Results: This research method uses a qualitative descriptive approach. The results of the research show that the BSI BKK Policy Evaluation for Pakraman Village in Buleleng District with a 4-indicator approach, namely input, process, output and outcomes, has not been optimal.

Limitations: In this study only used a few informants, therefore future research may consider using more informants.

Contribution: This research contributes to the Regional Government of Buleleng Regency.

Keywords: *Bali Smart Island, Free Wifi, Pakraman Village*

How to Cite: Widiasta, K., Widnyani, I.A.P.S., Astawa, I.W. (2023). Evaluasi Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus tentang Bali Smart Island di Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 3(1), 1-8.

1. Pendahuluan

Otonomi daerah membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya di pemerintahan daerah. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengawali babak baru sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Hal ini untuk menjawab perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Mardiasmo (2021), jika dicermati tentang maksud pemberian otonomi daerah dalam rangka memberi keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas merupakan kunci bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah (Muhamad, Budiani, Chamidah, Kardiyati, & Adjie, 2022). Pakar lain Ekowati (2005), mengatakan bahwa kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua ahli ini melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan kebijakan yaitu: 1) perumusan kebijakan, 2) pelaksanaan kebijakan, 3) penilaian kebijakan atau evaluasi. Berdasarkan Ekowati tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa makna kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah guna melaksanakan suatu kegiatan yang diawali dari pembuatan atau perumusan, pelaksanaan dan penilaian atau evaluasi kebijakan.

Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewajiban untuk memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, memberikan akses informasi seluas-luasnya

sesuai kepada masyarakat yang ada di daerahnya sesuai amanat pasal 31 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dengan adanya kewajiban tersebut Gubernur sebagai kepala pemerintah provinsi dan Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Otonom sudah sepatutnya melakukan kerjasama/bersinergi dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian nilai sosial budaya, sehingga diharapkan dengan adanya sinergi yang dilakukan Gubernur dengan Bupati/Walikota maka beban anggaran untuk kesejahteraan masyarakat dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Supriadi, Astuti, Darina, Frediani, & Pigai, 2021). Pemerataan terhadap akses teknologi informasi, seperti jaringan internet sangat diperlukan dalam usaha untuk melakukan pemerataan pembangunan di semua bidang sehingga dapat mengurangi disparitas pembangunan antara kota dan desa (Tuhana & Daerobi, 2022). Dalam bidang ekonomi contohnya, ketersediaan akses teknologi informasi dapat digunakan untuk mengenalkan dan memasarkan produk industri kreatif sehingga pelaku industri kreatif dapat terus berkembang (Gibran, Jaddang, & Ardiansyah, 2021).

Namun sayangnya, akses internet di Indonesia belum tersedia merata ke seluruh wilayah khususnya di daerah pelosok. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016 mengungkap bahwa penetrasi internet 132,7 juta terhubung internet mayoritas masih berada di Pulau Jawa sebesar 65% dan di Bali hanya 4,7%. Program Bali Smart Island (BSI) tersebut sudah akan berjalan dengan koordinasi dari Bappenas dan Kementerian Kominfo, serta pemerintah provinsi. Target di tahun 2023 Bali zero blank spot dan akan semakin top Bali, menjadi 'Bali Era Baru' yang sesuai dengan visi Gubernur Bali Wayan Koster yakni 'Bali Smart Island'. Sebagai langkah nyata menuju 'Bali Bebas Blank Spot Internet. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Provinsi Bali di Tahun Anggaran 2019 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.9.246.500.000-, 2020 sebesar Rp.9.245.500.000-, dan 2021 sebesar Rp.9.245.500.000-, digunakan untuk Penyelenggaraan Akses Free Wifi di 8 (delapan) kabupaten/kota, minus Pemkab.Badung karena sudah mandiri untuk BKK.

Dalam perjalanan selama pelaksanaan program BKK BSI di tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak selamanya mulus dan lancar, hal ini tidak lepas dari kondisi geografis Kabupaten Buleleng "nyegara gunung" atau banyak perbukitan dan panjangnya pantai membuat terjadi kendala dalam pemasangan wifi BSI, sehingga realisasi pemasangan titik awal program BSI pada tahun 2019 hanya 66,6% atau dari target 125 titik hanya terealisasi 143 titik tersisa 72 titik. Tidak tercapainya target dari realisasi baik dari sisi fisik maupun keuangan tentunya akan menjadi permasalahan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, kurangnya aksesibilitas akibatnya kurangnya jaringan internet akan menambah blankspot suatu wilayah dan berimbas pada layanan informasi masyarakat. Selain kendala jaringan, hal lain yang ditemukan dalam pemasangan titik wifi BSI adalah seringnya mendapatkan permohonan pemindahan alat, serta pemanfaatan wifi belum maksimal untuk Desa Pakraman, masih disalah gunakan pemanfaatannya oleh anak-anak hanya untuk bermain games saja, juga tempat titik wifi yang belum tepat peruntukannya, misal di tempat A, ternyata kurang efektif menjangkau masyarakat secara luas, atau sebaliknya, karena terlalu banyak yang mengakses layanan wifi tentunya akan menghambat penggunaan yang sebenarnya yaitu membangkitkan ekonomi, potensi desa melalui digitalisasi dengan wifi BSI ini disuatu Desa Pakraman di Kabupaten Buleleng. Selain itu kebermanfaatan dari pengguna layanan terhadap konten-konten yang diakses menjadi permasalahan, alhasil tujuan utama yakni promo potensi daerah, layanan publik maupun sharing informasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Pemerintah Provinsi Bali selaku pembuat kebijakan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng khususnya penyediaan wifi Bali Smart Island (BSI) di seluruh Desa Pakraman khususnya di Kecamatan Buleleng mengharapkan implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Adanya reaksi dari masyarakat, baik itu reaksi bersifat positif maupun negatif tentu saja merupakan keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan. Kebijakan publik seringkali terjadi kegagalan dalam meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Wibawa (1994), mengemukakan bahwa "evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui empat aspek yaitu: 1). Proses pembuatan kebijakan; 2). Proses implementasi; 3). Konsekuensi kebijakan; 4). Efektivitas dampak kebijakan. Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu : (1) indikator input; (2) indikator process; (3) indikator

outputs; (4) indikator outcomes (Badjuri & Yuwono, 2002). Betapapun kemajuan yang telah dicapai, masalah evaluasi terhadap kemajuan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tetap perlu dilaksanakan untuk mengetahui penyebab dari kegagalan, proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan efektivitas dampak kebijakan.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

- a. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. Edward III dalam Suharto (2009), mengungkapkan bahwa salah satu aspek penting dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial disamping faktor komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi.
- b. Indikator process memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Dunn (2003), mengatakan bahwa efektivitas berarti apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? Sedangkan efisiensi berarti seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
- c. Indikator outputs memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
- d. Indikator outcomes (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Grindle dalam Syaukani, Gaffar, and Rasyid (2002), bahwa : Keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan ditentukan oleh banyak hal terutama menyangkut kepentingan-kepentingan yang terlibat di dalamnya. Sebuah kebijakan sederhana tentu saja tidak melibatkan kepentingan banyak orang, kelompok dan masyarakat sehingga pada akhirnya tidak akan membawa perubahan yang besar. Sebaliknya semakin melibatkan banyak kepentingan maka keterlibatan seseorang atau kelompok dalam implementasi kebijakan tersebut akan sangat tergantung apakah kepentingannya terlindungi atau bahkan orang atau kelompok tersebut akan memperoleh manfaat yang tinggi atau tidak.

Dari langkah-langkah tersebut di atas, maka akan didapatkan hasil evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Bantuan Keuangan bersifat Khusus (BKK) melalui Dinas Kominfosanti Kab. Buleleng kepada Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Hasil evaluasi sekaligus memuat kesimpulan tentang proses pelaksanaan kebijakan sekaligus rekomendasi/saran yang dihasilkan atas telah dilakukannya evaluasi.

3. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng di Jalan Pahlawan No. 1 Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang berisikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh informan yang telah ditentukan sebelumnya, mengenai fakta dan permasalahan serta kendala yang dialami serta dirasakan di lapangan sehingga data yang diperoleh adalah data yang akurat bagi penelitian ini. peneliti menggunakan metode penentuan informan nonprobability sampling dengan teknik yakni purposive sampling. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan online. Teknik analisis data kualitatif yaitu teknik analisis data yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil Evaluasi Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali, Bali Smart Island (BSI) di Dinas Kominfosanti pada Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng belum optimal. Jika cermati dari hasil wawancara, observasi di lapangan dan bukti dukung lainnya. Dana operasional di anggaran induk

TA. 2019 No. DPA: 1.02.10.1.02.10.01.15.012.5.2 yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.080.000.000,00. Kemudian pada TA. 2020 dengan No. DPA. 1.02.10.1.02.10.02.15.012.5.2 yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.288.320.000,00. Dana itu termasuk biaya sosialisasi hingga monitoring dan evaluasi. Kemudian pada TA. 2021 dengan No. DPA. 1.02.10.1.02.10.02.15.012.5.2 yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.277.497.755. Dana itu termasuk biaya sosialisasi hingga monitoring dan evaluasi. Dari jumlah dana tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk bantuan kepada Desa Pakraman saja, melainkan operasional tenaga non ASN dan lainnya. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA. 2019, 2020 dan 2021.

Dari komposisi anggaran di atas terlihat bahwa anggaran yang ada tidak mempunyai dampak yang langsung diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat selaku pelaksana kebijakan sangat mengharapkan adanya dana pendampingan yang memiliki nilai guna untuk peningkatan kapasitas krama pakraman dan sosialisasi krama. Selain itu pemasangan titik free wifi ini masih sedikit, jika dibandingkan luas wilayah dan jumlah krama desa yang memanfaatkan. Untuk itu perlu dana pendampingan untuk memperluas akses dan jangkauan free wifi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai pada Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE berjumlah 18 orang, terdiri dari 4 (empat) orang PNS dan sisanya 13 orang masih berstatus Tenaga Kontrak. Seksi Layanan Internet sendiri memiliki 6 (enam) orang staf yang masih berstatus tenaga kontrak 5 orang, PNS 1 orang. Dengan demikian sumber daya manusia di Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE belum optimal untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK), BSI ini karena latar belakang pendidikan staf yang rata-rata tingkat SMK dan status kepegawaiannya yang masih tenaga kontrak sehingga ada ketidaksesuaian antara pengetahuan, keterampilan dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya

Dari indikator input dikarenakan dukungan anggaran kurang memadai jika dilihat dari kebutuhan sarana dan prasarana free wifi di masing-masing Desa Pakraman dan sumber daya manusia yang belum memadai baik pelaksana maupun penerima kebijakan BSI ini. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satriajaya, Handajani, and Putra (2018), yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan BKK belum terlaksana secara optimal dilihat dari sumber daya yang ada. Ini menyebabkan layanan free wifi di Desa Pakraman belum optimal tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemanfaatan sarana free wifi bagi masyarakat umum dan pelajar tidak sepenuhnya terpenuhi. Hal ini setelah berjalannya waktu banyak Desa Pakraman yang meminta pemindahan alat di tempat kantor Desa Pakraman dengan alasan memudahkan pengawasan kepada pengguna layanan. Ini menunjukkan kurangnya perencanaan saat persetujuan titik wifi oleh Desa Pakraman. Sehingga permohonan pindah tempat sering diterima.

Selain kurang pemahannya dalam menentukan target sasaran kepada pengguna, sering kali para prajuru ingin menikmati layanan wifi gratis ini untuk kepentingan pribadi dengan berbagai alasan agar dipindahkan. Pelaksanaan kebijakan Bantuan Keuangan kepada Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng kurang efektif dilaksanakan akibat kurangnya pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, sehingga menimbulkan konsekuensi-konsekuensi langsung berupa protes masyarakat atau pemindahan titik wifi. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Winarno (2002), yang mengatakan bahwa :Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan beberapa kebijakan mempunyai beberapa konsekuensi secara langsung. Pertama, beberapa tanggung jawab secara sungguh-sungguh tidak akan dipenuhi atau tidak tepat pada waktunya. Kedua, ketidakefisienan. Kebijakan yang tidak tepat menyebabkan unit-unit pemerintahan lain atau organisasi-organisasi dalam sektor swasta membeli perlengkapan, mengisi formulir atau menghentikan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Jadi kesalahan dalam menjalankan kebijakan termasuk mengimplementasikan wewenang yang telah dilimpahkan akan berakibat pada dua hal yakni tidak terpenuhinya tanggung jawab tepat pada waktunya dan inefisiensi atau pemborosan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan Bantuan Keuangan kepada Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng

dari metode atau cara yang dipergunakan belum optimal karena masih ada hasil yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali pada Dinas Kominfo tentang Bali Smart Island (BSI) kepada Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng dilihat dari indikator Proses berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi dan data sekunder menyimpulkan bahwa proses ditransformasikan menjadi layanan, efektifitas dan efisiensinya belum optimal dikarenakan kurangnya perencanaan akan target sasaran dan situasi di lapangan sangat berbeda dengan kabupaten lain. Dari teori kebijakan publik menurut Wahab (1997) adalah : “Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan”. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu Satriajaya, Handajani, and Putra (2018), yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan BKK suatu daerah tidak lepas dari perencanaan yang matang, salah perencanaan karena kurangnya koordinasi, komunikasi dan survey dilapangan akan berimbas tidak efektifnya sebuah kebijakan.

Evaluasi Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali pada Dinas Kominfo tentang Bali Smart Island (BSI) kepada Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng dilihat dari indikator output berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi dan data sekunder menyimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat belum optimal, karena kurangnya perangkat wifi yang disediakan secara tidak langsung membatasi aktivitas krama desa dalam konteks pengguna layanan wifi. Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus ini diberikan telah banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Pakraman dengan memanfaatkan layanan free wifi BSI. Hasil dari berbagai kegiatan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng, walaupun hasil kegiatan atas bantuan itu di masing-masing Desa Pakraman dapat berbeda atau bahkan sama, karena kegiatan tersebut ditentukan oleh krama/masyarakat itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dilihat dari output terhadap jumlah orang yang mengikuti layanan jika diproyeksi dari tingkat pengguna hanya segelintir orang atau tidak seluruh masyarakat yang memanfaatkan, karena faktor pendidikan, usia, dan tingkat kesejahteraan masyarakat Outcomes.

Menurut Dye (1981), terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan yakni : 1) Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target; 2) Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target; 3) Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa depan; 4) Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber daya dan dana (uang) yang telah digunakan dalam program; 5) Biaya tidak langsung kebijakan, yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lain; dan 6) Tentu saja, juga sulit mengukur manfaat tidak langsung dari kebijakan terhadap komunitas yang dituju oleh suatu program kebijakan. Merujuk pada teori di atas maka evaluasi kebijakan berupa dampak, dapat diamati dari gejala Dampak positif kebijakan Bantuan Keuangan kepada Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng. Anggelina Sagita Sastrawan memberikan pernyataan bahwa kebijakan Bantuan Keuangan kepada Desa Pakraman ini memberikan dampak positif berupa terciptanya penguatan akses informasi, kelancaran tugas-tugas Desa Pakraman kelancaran kegiatan adat dan budaya yang terlihat dari indikator-indikator berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa Pakraman, pelestarian budaya-budaya yang tumbuh dan berkembang di Desa Pakraman, pelayanan dasar di sektor kesehatan dan pendidikan dengan layanan free wifi.

Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali Bali Smart Island (BSI) kepada Desa Pakraman ini telah mampu melestarikan adat dan budaya dengan cara membangunkan, menguatkan dan membinanya melalui kegiatan dan program Desa Pakraman yang ditunjang dengan layanan wifi gratis dalam transfer ilmu dan komunikasi dalam dunia digital. Evaluasi Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali pada Dinas Kominfo tentang Bali Smart Island (BSI) kepada Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng dilihat dari indikator Outcomes atau dampak berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi dan data sekunder menyimpulkan bahwa kebijakan BKK BSI memiliki dampak positif yang diterima oleh masyarakat lebih besar daripada dampak negatif dari adanya kebijakan Bantuan Keuangan Bali Smart Island kepada Desa Pakraman sehingga kebijakan ini sangat layak untuk diteruskan. Penelitian ini juga didukung pula dari penelitian terdahulu Dewi, Yanti,

Dewi, Sanjaya, And Mahendra (2018), yang menyatakan kebijakan sebuah program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat cenderung akan berdampak positif.

Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali pada Dinas Kominfo tentang Bali Smart Island (BSI) kepada Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng bukan tanpa kendala. Hasil penelitian penulis dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dari wawancara, observasi dan data sekunder yang dihimpun menyimpulkan kendala geografis dan demografi wilayah Buleleng menyebabkan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali pada Dinas Kominfo tentang Bali Smart Island (BSI) kepada Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng belum optimal berjalan. Selain itu, faktor perencanaan dan anggaran yang kurang untuk memberikan pemecahan atas kendala yang dialami ini sesuai dengan teori dikemukakan oleh Badjuri and Yuwono (2002) yaitu : 1). Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya; 2). Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan; 3). Untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang. Hasil penelitian terdahulu Satriajaya, Handajani, and Putra (2018), yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan BKK suatu daerah tidak lepas dari perencanaan yang matang. Salah perencanaan karena kurangnya koordinasi, komunikasi dan survey dilapangan akan berimbas tidak efektifnya sebuah kebijakan.

Selain kendala geografis dan demografis, pelaksanaan Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali pada Dinas Kominfo tentang Bali Smart Island (BSI) kepada Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng juga faktor bencana non alam saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan tersendatnya pasokan alat-alat wifi dari luar Bali karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berdasarkan hasil wawancara dari informan, pengamatan dan penggunaan data sekunder disimpulkan Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali pada Dinas Kominfo tentang Bali Smart Island (BSI) kepada Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng belum optimal. Hasil ini didukung pula dari penelitian terdahulu Satriajaya, Handajani, and Putra (2018), yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan BKK suatu daerah tidak akan terlaksana dengan baik, jika ada faktor eksternal yang mengganggu contoh bencana alam maupun non alam.

Sebuah kebijakan jika dilakukan evaluasi secara berkelanjutan pasti dapat menjawab permasalahan yang dialami. Seperti penulis melakukan penelitian tentang Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali pada Dinas Kominfo tentang Bali Smart Island (BSI) kepada Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng. Hasil wawancara dengan informan, observasi dan menggunakan data sekunder, penulis menyimpulkan kendala dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali pada Dinas Kominfo tentang Bali Smart Island (BSI) kepada Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng akan dapat dicarikan solusi atau dapat diatasi seiring komitmen, koordinasi, komunikasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terhadap penyedia. Hal ini didukung pula dari teori Grindle dalam Syauckani, Gaffar, and Rasyid (2002), bahwa : Keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan ditentukan oleh banyak hal terutama menyangkut kepentingan-kepentingan yang terlibat di dalamnya. Sebuah kebijakan sederhana tentu saja tidak melibatkan kepentingan banyak orang, kelompok dan masyarakat sehingga pada akhirnya tidak akan membawa perubahan yang besar. Sebaliknya semakin melibatkan banyak kepentingan maka keterlibatan seseorang atau kelompok dalam implementasi kebijakan tersebut akan sangat tergantung apakah kepentingannya terlindungi atau bahkan orang atau kelompok tersebut akan memperoleh manfaat yang tinggi atau tidak.

Hasil penelitian terdahulu juga mendukung penelitian saat ini Dewi, Yanti, Dewi, Sanjaya, dan Mahendra (2018), bahwasannya jika semua pihak berkomitmen, mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menjalankan program kemiskinan, niscaya kebijakan apapun akan berhasil dilaksanakan. Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali pada Dinas Kominfo tentang Bali Smart Island (BSI) kepada Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng memiliki tujuan yang mulia untuk mencerdaskan masyarakat ditengah perkembangan teknologi informasi saat ini. Gubernur Bali dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali. Perlunya peningkatan akses teknologi

informasi yang merata untuk seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan Visi dan menjalankan Misi tersebut tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai, dan kepastian pembiayaan berupa ketersediaan wifi gratis untuk masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Bali. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut berbagai faktor harus dipertimbangkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Menurut teori Nakamura dan Smallwood Ekowati (2005), “Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah guna melaksanakan suatu kegiatan yang diawali dari pembuatan atau perumusan, pelaksanaan dan penilaian atau evaluasi kebijakan”.

Hasil penelitianpun menggambarkan Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali pada Dinas Kominfo tentang Bali Smart Island (BSI) kepada Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng belum optimal jika dilihat dari input, process, output dan outcomes serta kendala di lapangan. Belum optimalnya kebijakan ini karena input berupa sumber daya masih kurang, dari sisi proses yang ditransformasikan dalam bentuk layanan juga belum optimal serta belum efektif, sedangkan output masih sangat kurang, karena satu Desa Pakraman hanya menghasilkan output 1 titik free wifi yang berimbas pada kurangnya keterlibatan atau terbatasnya pengguna layanan free wifi ini. Untuk outcomes atau dampak yang ditimbulkan sangat positif terlebih dampak pandemi Covid-19 mengharuskan semua serba online. Dalam pelaksanaan kebijakan layanan free wifi kendala yang berarti ada pada pembangunan infrastruktur jaringan karena wilayah Buleleng yang berbukit-bukit, paling luas di Bali dan kendala PPKM karena Covid-19.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka ada beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil antara lain :

1. Hasil Evaluasi Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali pada Dinas Kominfo tentang Bali Smart Island (BSI) kepada Desa Pakraman di Kecamatan Buleleng belum optimal jika dilihat dari input, process, output dan outcomes serta kendala di lapangan. Belum optimalnya kebijakan ini karena input berupa sumber daya masih kurang, dari sisi proses yang ditransformasikan dalam bentuk layanan juga belum optimal serta belum efektif, sedangkan output masih sangat kurang, karena satu Desa Pakraman hanya menghasilkan output 1 titik free wifi yang berimbas pada kurangnya keterlibatan atau terbatasnya pengguna layanan free wifi ini.
2. Adapun kendala belum tercapainya target pemasangan jaringan free wifi dari Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali pada Dinas Kominfo tentang Bali Smart Island (BSI) kepada Desa Pakraman di Buleleng pada periode 2019, 2020 dan 2021 adalah faktor geografi Kabupaten Buleleng yang luas dan negara gunung khususnya desa yang ada di pelosok-pelosok sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut belum optimal.
3. Solusi atas kendala yang dihadapi dalam membangun jaringan internet adalah mencari pihak penyedia yang memiliki komitmen dan hasil kerja yang nyata di dunia jaringan internet berskala nasional. Pemilihan penyedia ini membutuhkan komunikasi yang baik, intens serta perjanjian kerjasama yang pasti.

Hasil evaluasi Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali pada Dinas Kominfo tentang Bali Smart Island (BSI) kepada Desa Pakraman dalam bentuk layanan free wifi untuk terus dilanjutkan, walaupun belum optimal, karena dampak positif sangat dirasakan oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Hanya pelaksanaan ke depan dalam perencanaannya hendaknya menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Diarahkan segera mencari penyedia atau pihak ketiga yang memiliki rekam jejak bagus dalam pembangunan jaringan. Berikan kerjasama yang pasti dan saling menguntungkan. Bangun komunikasi, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam memecahkan permasalahan dalam pembangunan jaringan ini.

Limitasi dan studi lanjutan

Dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa informan, oleh sebab itu penelitian mendatang dapat mempertimbangkan menggunakan lebih banyak informan.

Ucapan terima kasih

penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Drs. I Wayan Astawa, SH., M.AP selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan kerelaan hati yang tulus dalam memberikan bimbingan juga masukan kepada penulis hingga selesainya penulisan Jurnal ini.

Referensi

- Badjuri, A. K., & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi* Semarang: Undip Press.
- DEWI, P. A. D. R., YANTI, P. T. E., DEWI, L. P. P., SANJAYA, K. A. P., & MAHENDRA, I. P. U. Y. (2018). Implementasi Program Gerbang Sadu Mandara di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8(3).
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (edisi kedua), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (1981). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, N.J : Prentice-Hall Inc.
- Ekowati, M. R. L. (2005). *Perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan atau program*, edisi revisi. Bandung: PT Rosdakarya.
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(1), 69–82. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291>.
- Mardiasmo, M. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*: Penerbit Andi.
- Muhamad, M., Budiani, S. R., Chamidah, N., Kardiyati, E. N., & Adjie, M. (2022). Peran Bumdes dalam Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Lereng Sumbing, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(4), 211-220.
- Satriajaya, J., Handajani, L., & Putra, I. (2018). Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus dari pemerintah kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5(1), 1-14.
- Suharto, E. (2009). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*.
- Supriadi, R. A., Astuti, M. W., Darina, S., Frediani, I., & Pigai, T. N. (2021). Analisis evaluasi kebijakan publik bantuan tunai: studi kasus bantuan tunai di provinsi Lampung. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 1(1), 25-42.
- Syaukani, H., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2002). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan: Kerjasama* Pustaka Pelajar [dan] Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.
- Tuhana, A. S. M., & Daerobi, A. (2022). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 25-43.
- Wahab, S. A. (1997). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Penerbit Balai Pustaka Jakarta.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan publik. Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*: Media Pressindo.